

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*) OLEH PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh
MUHAMMAD ZUBAIR HUSAIN
NIM. 10500108030

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Muhammad Zubair Husain**, NIM: 10500108030, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jenepono)**,” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Juli 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kasjim Salenda, SH, M.Th.I
NIP. 196008171992031001

Andi Safriani, SH, MH
NIP.198311222009122002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2012

Penyusun,

MUHAMMAD ZUBAIR HUSAIN

NIM : 10500108030



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto),” yang disusun oleh Muhammad Zubair Husain, NIM: 10500108030, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 M, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 30 Juli 2012 M.
10 Ramadhan 1433 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	: DR. Hamsir, SH., M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: DR. H. Lomba Sultan, MA.	(.....)
Munaqisy II	: DR. Marilang, SH., M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: DR. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I	(.....)
Pembimbing II	: Andi Safriani, SH, MH.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.
NIP. 195704141986031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11-24
A. Tinjauan Tentang Pembuktian	11
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan	19
C. Tinjauan Tentang Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)..	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25-27
A. Jenis Penelitian	25
B. Metode Pendekatan Penelitian	25
C. Metode Pengumpulan Data	26
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	28-68
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Jeneponto.....	28
B. Ketentuan Hukum Acara Tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	30
C. Pelaksanaan Hukum Acara Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) (Study Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto	36
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Pembuktian Dan Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	63
BAB V PENUTUP	69-70
A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	71-72



ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : MUHAMMAD ZUBAIR HUSAIN

NIM : 10500108030

JUDUL SKRIPSI : Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto).

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Study Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data. Data sekunder dan data primer yang bersumber dari dokumen, buku-buku, literatur, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kasus. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian pada pemeriksaan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP Bab XVI, sebagaimana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam proses pembuktian tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan pengadilan negeri Jeneponto dalam kasus Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO, untuk mengungkap fakta maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yakni, Saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk berupa Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa. Sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka terdakwa didakwa dengan pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Penegakan hukum pidana pada umumnya di persidangan harus berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu mengenai tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) ketentuannya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai tentang penegakan hukum tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di pengadilan harus tetap berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti dengan tindak pidana pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, karena hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan idiologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : "...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..."¹

Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib

¹Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945* (t.t: Permata Press, t.th), h. 34.

dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Tidak terlepas dari itu, bidang kehutanan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini diakibatkan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia, dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat dimanfaatkan. Dengan banyak manfaat tersebut, hutanpun menjadi sangat idola bagi pemanfaatan sumber daya kekayaan alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama penebangan hutan. Padahal jika dipahami keberadaan hutan, tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan sebagai paru-paru dunia, senjata ampuh bagi pemanasan global serta banyak manfaat lain. Yang menjadi masalah saat ini pengelolaan hutan yang dilakukan secara *illegal* telah membuat dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan sisi lainnya.

Banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana akibat dari *Illegal Logging* di Indonesia. Hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk. Para penebang liar hidup di tempat yang mewah, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dekat hutan dan tidak melakukan *Illegal Logging* hidup miskin dan menjadi korban atas perbuatan jahat para penebang liar. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial yang sangat menyakitkan masyarakat. Berdasarkan citra satelit 1995-1999 hutan produksi yang rusak di Indonesia pada 432 HPH mencapai 14,2 juta hektar, sedangkan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 5,9 juta hektar. Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2001 oleh Forest

Watch Indonesia diungkapkan laju kerusakan hutan pada era tahun 1980-an di Indonesia adalah sekitar satu juta hektar/tahun, kemudian pada awal tahun 1990-an tingkat kerusakan mencapai 1,7 juta hektar/tahun. Lalu, sejak tahun 1996 meningkat lagi menjadi rata-rata dua juta hektar/tahun. Hutan yang sudah terdegradasi dan gundul di Indonesia ada di Sumatera (terdegradasi 5,8 juta hektar dan gundul 3,2 juta hektar), di Kalimantan (degradasi 20,5 juta hektar dan gundul 4,3 juta hektar), di Sulawesi (degradasi dua juta hektar dan gundul 203.000 hektar), di Nusa Tenggara (degradasi 74.100 hektar dan gundul 685 hektar), di Papua (degradasi 10,3 juta hektar dan gundul 1,1 juta hektar); dan di Maluku (degradasi 2,7 juta hektar dan gundul 101.200 hektar). Kerusakan itu disebabkan oleh pemilik HPH melanggar prosedur, penebangan *Illegal*, perambahan hutan, pembukaan hutan skala besar, kebakaran hutan, serta banyaknya lokasi tambang di daerah hutan lindung dan daerah konservasi meskipun dilarang berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Kondisi ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu.²

Dengan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah (*Illegal*) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh sebab itu diperlukan pengaturan untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di bidang kehutanan agar hutan tetap bisa dilestarikan sebagai sumber daya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain itu, dengan adanya aturan tentang kehutanan maka kerusakan hutan dapat berkurang, terlebih dahulu telah dijelaskan dalam pandangan Islam tentang lingkungan secara garis besar, seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum (30) ayat 41 :

²<http://Status.Lingkungan.Hidup.Indonesia.Tahun.2002>. Di akses pada 23-Oktober-2011

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³

Selain itu, dengan pemerintah membentuk undang-undang tentang kehutanan karena dinilai memerlukan sumber hukum yang sangat diperlukan untuk melindungi hutang di Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁴ Untuk saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan sudah spesifik atau khusus pengaturannya yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Akan tetapi peraturan mengenai tindak pidana kehutanan masih tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku didalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maka pemerintah berharap agar masyarakat bisa menyadari bahwa betapa pentingnya melestarikan hutan. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengatur tentang tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) agar tidak dilakukannya perbuatan yang semena-mena terhadap hal kehutanan. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka dapat diharapkan meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup. Landasan hukum ini tentunya sangat baik dengan

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), h. 647

⁴Sutrisno R. Pardoen, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1989), h. 51

ditunjangnya aspek Pidana didalamnya yang dapat membatasi dan mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan.

Istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah, kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif didalam pembangunan yang bewawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.⁵ Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Pompe dan Jokers adalah sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*teorekeningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *teorekenbaar*. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak diuar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak didalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian (*onachtzaamheid*) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas.⁶

Dari penjelasan tersebut diatas, mengenai masalah tindak pidana pada umumnya dalam pemeriksaan di muka pengadilan, pembuktian adalah bagian yang

⁵ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2000), h.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2008), h. 104

sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk mencapai itu, dimana hakim menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184, begitupun juga dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa karena penuntut umum berdasar atas alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan. Sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan atas KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 maka tindak pidana penebangan

⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 437

liar (*Illegal Logging*), dalam pelaksanaan pembuktiannya dilakukan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pembuktian perkara tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) termasuk mengenai alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengkaji proses pembuktian perkara penebangan liar pada umumnya dan proses pembuktian perkara penebangan liar di pengadilan negeri Jeneponto. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : **“Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Oleh Penuntut Umum (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*)?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum acara tentang tindak pidana pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) (Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum pembuktian dan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi cakupan penelitian maka pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) dan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) (Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan target waktu penelitian yang dilakukan dari tanggal 20 juni sampai dengan 25 juli 2012.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*)
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) (Study Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

- 2) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- 3) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi Ilmu hukum terkhusus untuk hukum pidana.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- b. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya terutama dalam hukum acara pidana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- c. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

E. Garis Besar Isi

Bab I yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi.

Berikutnya bab II yaitu tinjauan pustaka yang berisikan uraian mengenai tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang kejaksaan, dan tinjauan tentang penebangan liar (*Illegal logging*).

Kemudian bab III yakni metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

Selanjutnya pada bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum Pengadilan Negeri Jeneponto, ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*), pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Study Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto), pandangan hukum islam terhadap hukum pembuktian dan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

Terakhir pada bab V yaitu penutup dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan Implikasi Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembuktian

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Secara *etimologi* “pembuktian” berasal dari kata dasar *bukti* dengan memberikan imbuhan awalan *pem* dan akhiran *an* yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa ; keterangan nyata. Secara *terminologi* pengertian “pembuktian” menurut Subekti (1989: 78) yang menyebutkan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu pesengketaan.¹

“Pembuktian” yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan.²

Hukum “Pembuktian” merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan.³

Dalam hukum acara pidana pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati.⁴

¹H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 107

²Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 21

³*Ibid*

⁴Kurnianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* (Jakarta: Usaha Nasional, 1991), h. 24

Dalam hukum acara perdata pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran formil siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan (pasal 163 HIR, pasal 283 R. Bg, dan pasal 1865 BW).⁵

Hukum Pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.⁶

2. Alat-alat Bukti Yang Sah Dalam Proses Pembuktian

Dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dalam persidangan di pengadilan maka proses pembuktian harus dengan alat-alat bukti yang ditentukan atau diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981, meliputi :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.⁷

Jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh Pasal 108, 116, 160, s.d 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185 KUHAP. Dari pasal-pasal diatas, yang terutama diketahui adalah orang

⁵*Ibid*

⁶H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 24

⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 363

yang dapat menjadi saksi. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan pasal 184 ayat (1) a KUHP atau sebagai “petujuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁸

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHP yaitu :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹

Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyelidikan atau permintaan penyidik. Ahli membuat laporan atau *Visum et revpertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli yang diminta dapat disampaikan di sidang peradilan, diajukan oleh penuntut umum, pensihat hukum.¹⁰

3. Surat

Pengertian alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :¹¹

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau

⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 29

⁹R. Soenarto Soerodibroto, *Loc.cit.*

¹⁰Alfitra, *op. cit*, h. 75-76

¹¹R. Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, h. 439

keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu;

- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. *Petunjuk*

Di dalam KUHAP, alat bukti petunjuk ini dapat kita lihat di dalam Pasal 188 yang berbunyi sebagai berikut :¹²

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi ;
 - (b) Surat ;
 - (c) Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

¹²*Ibid*, h. 440

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :¹³

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi, meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang dikejar adalah kebenaran material.¹⁴

3. Asas-asas Pembuktian

Di dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu :¹⁵

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. *Notoire*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Alfitra, *Op.Cit*, h. 120

¹⁵ <http://www.Asas-asas-pembuktian-dalam-hukum-pidana.com> (Diakses pada 02Oktober 2011)

feiten adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan *notoire feiten* tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut Undang-Undang. Hakim tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa.

2. Menjadi saksi adalah kewajiban

Diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan: "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Dengan demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Satu saksi bukan saksi

Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Prinsip ini disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan. Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri sendiri yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum.

4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan "pembuktian terbalik" atau lebih tepatnya "pembalikan beban pembuktian" yang tidak dikenal

hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 184 ayat (4) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

4. Teori atau Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian pembuktian yang mengandung isi yang, demikian dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.¹⁶

Ada beberapa sistem pembuktian yakni :¹⁷

1. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di Pengadilan Distrik dan pengadilan Kabupaten.

2. Sistem Positif (*Positif Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

¹⁶H. Adami Chazawi, *Loc. cit*

¹⁷Leden Marpaung, *op. cit*, h. 26-28

3. Sistem Negatif (*Negatif Wittelijk*)

Hakim ditentukan / dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai / menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi ini pun masih kurang, hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian / keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP / UU No. 8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dahulu, dimasa berlakunya HIR (Sebelum KUHP), sistem ini pun dianut, yang diatur oleh Pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti yang termuat dalam undang-undang mendapat keyakinan bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu.
- (2) Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan suatu persangkaan belaka ataupun pembuktian yang tidak sempurna.

4. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. Berdasarkan Pasal 183 KUHP maka KUHP memakai “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya bukti keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti yang sah dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi

dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Rumusnya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis alat bukti.

B. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”¹⁸

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁹

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP,

¹⁸Leden Marpaung, *Op.cit*, h. 191

¹⁹*Ibid*, h. 265

Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁰

4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang Penuntut Umum adalah :²¹

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan mengubah status penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan berkas ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan ;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim ;

²⁰R. Soenarto Soerodibroto, *op. cit*, h. 359

²¹ *Ibid*, h. 368

C. Tinjauan Tentang Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

1. Pengertian Hutan

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa belanda dan *forrest* dalam bahasa Inggris artinya rimba atau wana. Dalam *Blak's Law Dictionary* (Gener, 1999: 660), *forrest* adalah “*a tract of land, not necessarily wooded to the king or a grantee, for hunting deer and other game*” artinya suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja atau penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lainnya.²²

Dalam hukum Inggris kuno, *forest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan dan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya belukar atau hutan perawan, dan lain-lain.²³

Hutan dan kawasan hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai berikut :

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alami hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.²⁴

²²Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 35

²³*Ibid*

²⁴Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2000), h.

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2) yaitu

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. :²⁵

2. Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk mempertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.²⁶

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (3) yaitu :²⁷

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Pengertian Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

“*Illegal Logging*” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Illegal*” artinya tidak sah atau bertentangan dengan hukum / Merupakan Pelanggaran.²⁸ Dalam bahasa belanda juga dijelaskan yang berarati “*Illegaal / Onwetting*” adalah tidak sah,

²⁵Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *op.cit*, h. 36

²⁶Alam Setia Zain, *op.cit*, h. 2

²⁷<http://www.Kehutanan.com>, Diakses (04 Oktober2011, pukul 15:39:49)

²⁸Andre Wicaksono, *Kamus Lengkap 900 Milliard Inggris Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu , t. Thn), h. 129

tidak sah menurut Undang-undang, gelap, melanggar hukum.²⁹ Sedangkan “*Logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.³⁰

Berdasarkan temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, Penebangan liar adalah Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.³¹

“Penebangan liar” adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi kehutanan digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas / target yang diberikan instansi / pejabat kehutanan.³²

“*Illegal Logging*” (Menurut FWI) “*Illegal Logging*” menjadi dua yaitu; *Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.³³

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Illegal Logging*

Menurut **Dudley** (Colfer dan Resosudarmo, 2003 : 448 dan 450) bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *Illegal* pada tingkat lokal dan yang memungkinkan *Illegal* meluas dengan cepat, yaitu :³⁴

²⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)* (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), h. 454

³⁰Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Loc.Cit*

³¹Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Loc.Cit*

³²Alam Setia Zain, *Loc.Cit*.

³³*Ibid*

³⁴Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *op.cit*, h. 95-98

- 1) Faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur :
 - (1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
 - (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara Illegal
 - (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
 - (4) Dukungan terhadap pengelolaan lestari.
- 2) Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti :
 - (1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.
 - (2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.
 - (3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.
- 3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengarangnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti
 - (1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.
 - (2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal.
 - (3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *Illegal Logging*.
 - (4) Banyaknya kerjasama *Illegal* yang dilakukan oleh pengusaha dengan pengurus atau pejabat lokal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka dalam penulisan skripsi ini biasa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai ketentuan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*)

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case study*).

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK)
 - 6) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - 2) Literatur dan hasil penelitian putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet dan lain sebagainya.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk itu permasalahan hukum akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui ketentuan dan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*)

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Jenepono

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jenepono

Gedung Pengadilan Negeri Jenepono yang terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing Kel. Monro-Monro Kec. Binamu Kab. Jenepono di bangun pada zaman Belanda yang kira-kira dibangun pada tahun 1928 dan statusnya pada saat itu adalah milik Departemen Kehakiman dengan mempunyai ruangan-ruangan yang terdiri dari :

- (1) Ruang Sidang
- (2) Ruang Ketua
- (3) Ruang Hakim
- (4) Ruang Panitera
- (5) Ruang Pegawai
- (6) Ruang Gudang
- (7) WC

Gedung tersebut keadaannya tidak stabil lagi karena mengalami kerusakan-kerusakan antara lain atap, lantai, dinding, pintu-pintu dan sebagainya.

Disamping itu pula kapasitas gedung tersebut yang dengan ruangan-ruangannya serba sempit tidak memadai dengan jumlah karyawan Pengadilan Negeri Jenepono yang berjumlah pada saat itu 33 (tiga puluh tiga) orang. Selain karena keterbatasan ruangan tempat, maka sering pula di adakan persidangan di luar Kantor Pengadilan Negeri Jenepono tersebut, terutama perkara Perdata yang dilakukan di Kantor Kepala Desa.

Karena keterbatasan tersebut tidak hanya pada gedung dan bangunan kantor yang sempit, akan tetapi jumlah perkara pada saat itu banyak yang belum

di selesaikan oleh karena keterbatasan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto.

Hingga pada tanggal 13 Maret 1983 di resmikanlah gedung dan bangunan baru yang terletak di Jalan Pahlawan No. 14 Bontosunggu yang masih terpakai hingga sekarang ini, meskipun telah terjadi beberapa penambahan gedung dan bangunan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jeneponto

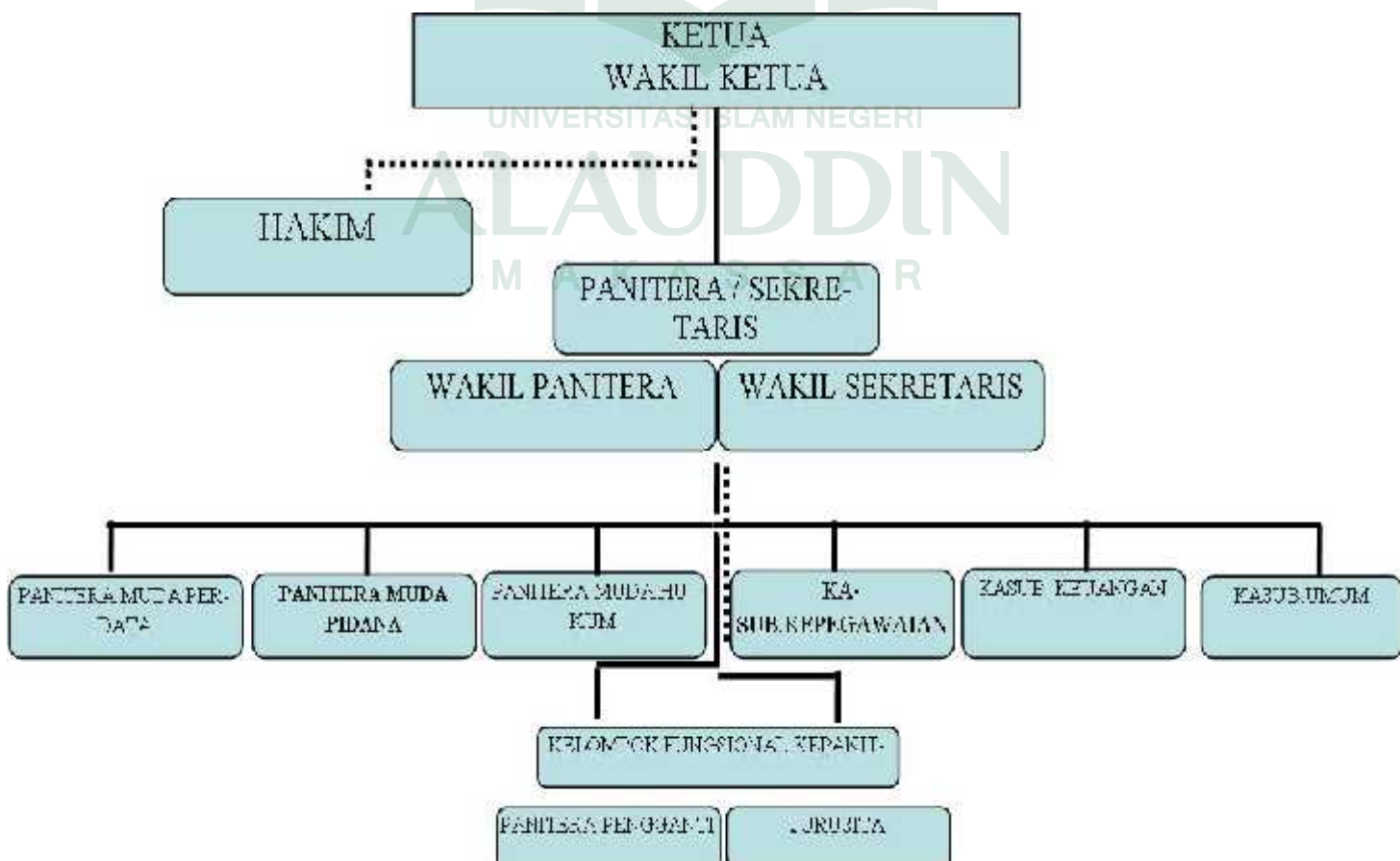
a. Visi

Sebagai lembaga peradilan dan penegak hukum, pengadilan sebagai Penyelenggara pembina hukum pelayanan publik atau birokrasi.

b. Misi

Sebagai lembaga hukum yang melayani, memeriksa, mengadili, dan Menyelesaikan setiap perkara yang ada

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jeneponto



B. Ketentuan Hukum Acara Tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

1. Hukum Acara Pembuktian Tindak Pidana

Dalam perkara tindak pidana pada umumnya dalam pemeriksaan di muka pengadilan, pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk mencapai itu, dimana hakim menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut yang berdasarkan pada pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting di persidangan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVI pasal 183 dan 184 dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 183 KUHP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa karena penuntut umum berdasar atas alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sah yang disebut dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h 437

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk dan
5. Keterangan Terdakwa²

Apabila dua atau lebih alat bukti telah diperoleh seperti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan. Sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan atas KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981.

2. Hukum Acara Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Mengenai perkara tindak pidana di Indonesia dalam pelaksanaan acara di persidangan maka harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 terutama dalam hal pembuktian perkara tindak pidana yakni pasal 183 dan 184. Guna untuk mencari kebenaran materil maka pembuktian dinyatakan tidak sah apabila suatu perkara tindak pidana tidak mengacu pada KUHAP pasal 183 dan 184. Demikian halnya pada tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 pasal 183 dan 184.

Penegakan hukum pidana terhadap penebangan liar (*Illegal logging*), diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan

² *Ibid*,

dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraf ke-18 UU No.41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa takut melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat. Reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar dan sekaligus mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum yang sama. Sejak tahun 1960-an tujuan reaksi negara terhadap pelaku kejahatan adalah untuk mendidik dan membina pelaku yang bersangkutan.³

Selain itu hukum juga sebagai sosial kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.⁴

Mengenai ketentuan pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketentuan pidana tersebut dapat

³ H. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) h 138

⁴ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h 22

dicermati dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dengan ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 yaitu :⁵

Pasal 50

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. **Menebang** pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut

⁵ http://www.Undang-undang_Kehutanan.com, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, Tentang Kehutanan Diakses 01 Januari 2012, pukul 20:40)

- diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

C. Pelaksanaan Hukum Acara Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Study Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto).

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berkaitan dengan hal itu maka tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) pada pembuktiannya juga membutuhkan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) dengan Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

1. Kasus Posisi

Untuk mengetahui proses pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) di Pengadilan Negeri Jeneponto, penulis akan menjelaskan mengenai putusan terhadap JUMRAH binti DA'DA yang telah didakwa melakukan tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*). Putusan terhadap JUMRAH binti DA'DA ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdakwa diajukan ke pengadilan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) pasal 50 ayat (3) f undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan ;
3. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa JUMRAH binti DA'DA, pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2009, bertempat di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah

menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- b. Bahwa awalnya Terdakwa ANDI BUDIMAN bin ZAENAL (yang diajukan secara terpisah) bermaksud membeli kayu jati lokal, lalu dengan perantara TAMBARA Dg MILE bin BASRI maka Terdakwa JUMRAH binti DA'DA menjual 104 (seratus empat) pohon kayu jati lokal yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang terletak di dalam kebunnya, padahal pohon kayu jati lokal tersebut adalah milik Negara yang tidak dapat diperjualbelikan karena terletak dalam kawasan hutan lindung desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto yang sudah ditandai dengan tapal batas atau patok batas kawasan hutan lindung. Terdakwa JUMRAH binti DA'DA menjual 104 (seratus empat) pohon kayu jati tersebut kepada ANDI BUDIMAN bin ZAENAL, seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dimana pembayarannya diterima oleh TAMBARA Dg MILE bin BASRI dari ANDI BUDIMAN bin ZAENAL kemudian diserahkan kepada Terdakwa JUMRAH binti DA'DA, karena merasa telah membeli kayu jati lokal tersebut, maka ANDI BUDIMAN bin ZAENAL kemudian menyewa tukang gergaji yakni AZIS lalu melakukan penebangan pohon kayu jati di dalam kawasan hutan lindung desa Gunung Silanu, dan meskipun ANDI BUDIMAN bin ZAENAL telah mengetahui bahwa pohon kayu jati yang dibelinya itu terletak di dalam kawasan hutan lindung, ANDI BUDIMAN bin ZAENAL tetap saja menebang pohon sebanyak 104 (seratus empat) pohon kemudian dipotong menjadi 307 (tiga ratus tujuh) batang kayu gelondongan ;
- c. Bahwa setelah dipotong menjadi 307 (tiga ratus tujuh) batang maka ANDI BUDIMAN bin ZAENAL kemudian mengumpulkan kayu jati tersebut di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya akan dijual ke makassar, namun petugas terlebih dahulu menemukan tumpukan kayu

tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

2. Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : **JUMRAH binti DA'DA**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Jeneponto
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bira-Bira Desa Gunung Silanu
Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SD tamat

3. Dakwaan

Proses pembuktian dimulai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa JUMRAH binti DA'DA terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMRAH binti DA'DA, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 307 (tiga ratus tujuh) batang kayu jenis jati berbentuk bantalan, dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Pembuktian

Berdasarkan pengertian pembuktian yakni “segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan”.⁶ Maka untuk menentukan apakah diri keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat terbukti atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal pembuktiannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 183 dan 184 Bab XVI Undang-undang No.8 tahun 1981 ;

Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁷ Selanjutnya dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar

⁶ Alfitra, *Op.Cit*, h 21

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *Loc.Cit*

pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menyebutkan Alat-alat bukti yang sah yaitu :⁸

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP yakni :

1. Keterangan Saksi

Telah didengar para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Saksi MAHJUD bin KARIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Bangkala ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan berkaitan dengan ditemukannya tumpukan kayu jenis jati di pinggir jalan di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saksi menemukan tumpukan kayu jati tersebut pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 sekitar jam 17.00 wita, ketika saksi sedang melakukan patroli dengan anggota Polsek Bangkala lainnya yang bernama BAHTIAR ;

⁸ *Ibid*,

- Bahwa saksi pergi ke lokasi kejadian karena sebelumnya ada laporan masyarakat tentang adanya pennebangan kayu jati di kawasan hutan lindung ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, saksi bersama dengan BAHTIAR ke lokasi kejadian dan menemukan kayu jati bantalan di pinggir jalan dan saksi menemukan pula tumpukan kayu jati yang berada di dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa setelah saksi menemukan tumpukan kayu jati dalam kawasan hutan lindung, kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat yakni TAHIR SUKKU, dan mendapat informasi bahwa yang membeli kayu jati tersebut adalah saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut setelah dilakukan pengecakan dan pemeriksaan tidak di lengkapi dengan dokumen dokumen antara lain Surat Izin pengolahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menebang pohon jati tersebut, hanya saja saksi mengetahui dari informasi masyarakat kalau kayu itu dijual oleh Terdakwa JUMRAH binti DA'DA melalui saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI yang kemudian kayu jati tersebut dibeli oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan lindung Gunung Silanu ;
- Bahwa kayu jati yang ditemukan oleh saksi sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) batang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui bahwa dirinyalah yang menjual, namun Terdakwa menyangkal pohon kayu jati tersebut berada dalam kawasan hutang lindung namun milik Terdakwa karena yang menahan pohon kayu jati tersebut adalah orang tua Terdakwa ;

(2) *Saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL :*

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena telah membeli pohon kayu jati yang berada dalam kawasan hutan lindung di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada yang menjual kayu atas informasi saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI yang saksi kenal ketika saksi berada di rumah temannya yang bernama Dg RANI di kampung Kapita Bangkala ;
- Bahwa pada saat saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI datang ke rumah Dg. RANI bercerita kalau ada keluarganya yang akan menjual kayu jati sehingga saksi tertarik mendengar penawaran dari saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI tersebut, sehingga karena saksi pernah berbisnis kayu di Bulukumba, maka atas informasi saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI, saksi tertarik untuk membeli pohon tersebut yang semula ditawarkan oleh saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi meminta kepada saksi tambara Dg MILE bin BASRI agar harga kayu tersebut diturunkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan harga itulah yang disepakati ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut, saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI juga menyampaikan kepada saksi kalau ada uang untuk kas desa sebesar 10 persen ;
- Bahwa saksi awalnya memberikan uang kepada saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), kemudian ditambah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa waktu itu tidak ada kwitansi yang diberikan kepada saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI dan hanya menggunakan sistem kepercayaan saja ;

- Bahwa saksi langsung saja yakin kalau kayu itu sah, karena transaksi jual beli tersebut diketahui oleh aparat desa setempat serta ada uang yang disetor ke kas desa ;
- Bahwa setelah membayar uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi TAMBARA Dg MILE bin BASRI, saksi lalu mencari tukang gergaji untuk menebang pohon kayu jati yang telah dibelinya tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau pohon kayu jati tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, namun saksi baru mengetahui setelah 3 hari kalau pohon kayu jati yang ditebangnya berada dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi hutan, di sana sudah ditandai pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dengan diberi tanda silang ;
- Bahwa pohon kayu jati itu diolah selama 3 (tiga) hari dan dipotong-potong sehingga berbentuk bantalan kayu jati, namun sementara diolah polisi dari Polsek Bangkala ;
- Bahwa saksi belum sempat mengangkut kayu jati yang diolah yang berjumlah 307 Batang tersebut ;
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI ;
- Bahwa saksi memperkirakan dari pembelian kayu jati tersebut, akan memperoleh untung sekitar Rp. 2 juta sampai Rp. 3 juta, tetapi akhirnya malah ditahan ;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan kalau mengetahui sejak awal pohon kayu jati tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, maka saksi tidak akan membeli pohon kayu jati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar ;

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih terdapat dua orang saksi sebagaimana tercantum dalam

berkas perkara a quo, yaitu saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI dan saksi KAMALUDDIN bin BANTO, namun demikian setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, ternyata sesuai relas panggilan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan karena tidak ada di tempat kediamannya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 162 KUHAP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak keberatan apabila keterangan para saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, Majelis Hakim berpendapat selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI dan saksi KAMALUDDIN bin BANTO sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut ;

(3) Saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan ditemukannya tumpukan kayu bantalan di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa kayu tersebut di temukan anggota Polsek Bangkala pada tanggal 9 Februari 2009 sekitar jam 23.00 wita ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa JUMRAH binti DA'DA yang diperoleh dari kawasan hutan lindung desa Gunung Silanu ;
- Bahwa kayu tersebut telah dijual oleh Terdakwa JUMRAH binti DA'DA kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL melalui saksi selaku perantara dimana kayu tersebut dijual oleh Terdakwa JUMRAH binti DA'DA seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa kayu jati tersebut dijual masih dalam bentuk pohon dan masih berada di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa dari transaksi jual beli tersebut, saksi juga memberikan uang kepada Kepala Dusun Bira-Bira yakni saksi KAMALUDDIN bin BANTO berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kas desa berdasarkan Peraturan Desa Gunung Silanu ;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah apapun atau keuntungan apapun dari penjual kayu tersebut ;
- Bahwa jumlah pohon yang dijual oleh Terdakwa JUMRAH bin DA'DA kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL adalah 307 (tiga ratus tujuh batang) bantalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa JUMRAH binti DA;DA tidak memiliki surat pemilikan atas lahan kayu jati yang dijual kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah Terdakwa JUMRAH binti DA'DA mengetahui kalau kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama kali Terdakwa JUMRAH binti DA'DA melakukan penjualan kayu jati kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa alasan Terdakwa JUMRAH binti DA'DA melakukan penjualan kayu jati tersebut karena menurutnya pohon kayu jati tersebut dimana oleh orang tuanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan telah benar ;

(4) Saksi KAMALUDDIN bin BANTO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan ditemukannya tumpukan bantalan kayu jati di kampung Bira-Bira, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa kayu tersebut ditemukan anggota Polsek Bangkala pada tanggal 9 Februari 2009 sekitar jam 23.00 wita.

- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa JUMRAH binti DA'DA yang diperoleh dari kawasan hutan lindung Desa Gunung Silanu ;
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa JUMRAH bin DA'DA melakukan penjualan pohon jati tersebut karena orang tua Terdakwa yang menanam pohon tersebut sehingga Terdakwa merasa berhak atas pohon tersebut ;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa JUMRAH bin DA'DA kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL adalah sebanyak 104 pohon dimana setelah ditebang kemudian dipotong menjadi 307 (tiga ratus tujuh) batang ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon adalah tukang gergaji yang disewa oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL, karena masalah penebangannya ditanggung oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penebangan di kawasan hutan tersebut, namun sudah mempertanyakan persuratannya kepada saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI dan dijawab oleh TAMBARA kalau akan diurus oleh Terdakwa, sehingga saksi menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dimasukkan ke kas Desa sesuai Peraturan Desa Gunung Silanu ;
- Bahwa dalam proses jual beli kayu jati tersebut, sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai perantara adalah saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI ;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi serahkan kepada TAHIR SUKKU (selaku Kepala Desa), namun uang tersebut kembali diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi, yang menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa JUMRAH bin DA'DA adalah saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa telah benar karena Terdakwa hanya menjual sedangkan surat-suratnya diurus semua oleh saksi TAMBARA DG MILE bin BASRI ;

2. Keterangan Ahli

Selain keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan keterangan ahli dari Kehutanan yaitu :

Ir. HAMZAD D bin MUH JUFRI :

- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli berkaitan dengan kapasitas saksi sebagai pegawai Dinas Kehutanan kabupaten Jeneponto berkaitan dengan perkara kehutanan di kawasan hutan lindung kampung Bira-Bira, Desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa saksi ahli tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian penebangan kayu tersebut, akan tetapi menurut saksi ahli penebangan kayu tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan perkampungan masyarakat ;
- Bahwa saksi ahli menyatakan di setiap hutan lindung selalu ada tapal batas yang ditandai dengan beton besi panjangnya 2 meter, di tanam sedalam 75 cm sebagai penanda batas antara kawasan hutan lindung dengan perkampungan masyarakat, yang dibuat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sebelum tapal batas dibuat, terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar perencanaan kawasan hutan lindung yang bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa wilayah akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung ;
- Bahwa pada kawasan hutan lindung Gunung Silanu, karena kawasan tersebut merupakan wilayah hutan yang dilindungi

oleh karenanya tidak ada yang diberikan Hak Pengolaan Hutan oleh Pemerintah ;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi kayu jati yang dijadikan barang saksi sudah berusia kira kira 30 tahun ;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi jenis kayu jati tersebut bukan tumbuhan Endemik di Jeneponto, sehingga agar dapat tumbuh haruslah ditanam terlebih dahulu dan berdasarkan pengetahuan saksi tanaman kayu jati tersebut sebagian ditanam oleh pemerintah sebagian lagi ada yang ditanam oleh warga masyarakat setempat ;
- Bahwa walaupun ada warga masyarakat telah menanam pohon kayu jati sebelum area tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, maka setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung maka warga masyarakat tidak boleh melakukan penebangan lagi dan kalau ada warga masyarakat yang keberatan terhadap penetapan kawasan hutan sebagai kawasan hutan lindung, seharusnya pada saat akan dilakukan penentuan tapal batas, masyarakat dapat mengajukan keberatannya ;
- Bahwa pada saat penentuan tapal batas kawasan hutan lindung Gunung Silanu, warga masyarakat dilibatkan dan Kepala Desa setempat mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, di Jeneponto ada 4 (empat) kawasan hutan lindung di 4 (empat) kecamatan yakni kecamatan Bangkala Barat, kecamatan Bangkala, kecamatan Bontoramba dan kecamatan Rumbia;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi luas kawasan hutan lindung di kabupaten Jeneponto sekitar 831 Ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan lacak balak ke lokasi penecbangan akan tetapi mengetahui jumlah pohon yang ditebang atas pemberitahuan teman saksi dari Dinas Kehutanan yang bernama MUH. RIJAL dan PREDRICK MATASAK yang melakukan lacak balak dimana pada saat

dilakukan lacak balak telah ditemukan kayu jati sebanyak 307 pohon dengan volume 13,87 m³ ;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi penebangan kayu di kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, sehingga terjadi tanah longsor, dan erosi ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak mengetahuinya ;

3. *Petunjuk (Berupa Barang Bukti)*

Keseluruhan materi keterangan para saksi dan keterangan ahli tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan **Barang Bukti** untuk mendukung Dakwaannya, yaitu : **307 (tiga ratus tujuh) batang kayu jenis jati berbentuk bantalan**, yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 39 KUHAP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Jeneponto Nomor : SP.Sita / 14 / II / 2009 / Reskrim tertanggal 11 Februari 2009 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto mengenai Ijin Penyitaan Nomor : 40 / PBB / Pen.Pid / PN.JO tanggal 20 Februari 2009.

4. *Keterangan Terdakwa*

Selain keterangan para saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan transaksi jual beli kayu jati antara saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual pohon kayu jati sebanyak 104 pohon dan menurut Terdakwa pohon kayu jati tersebut yang menanam adalah orang tuanya ;
- Bahwa terdakwa menjual pohon kayu jati karena terdakwa didatangi oleh saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI yang mengatakan kepada terdakwa untuk menjual kayu jati milik terdakwa karena saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL akan membeli kayu jati tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual pohon kayu jati tersebut dengan alasan terdakwa membutuhkan uang untuk membiayai anak-anaknya karena suami terdakwa telah meninggal dunia ;
- Bahwa menurut terdakwa yang akan mengurus surat-surat berkaitan dengan jual beli pohon kayu jati tersebut adalah saksi TAMBARA Dg. MILE bin BASRI ;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan pohon kayu jati di rumahnya di kampung bira-bira, pada hari senin 9 Februari 2009 sekitar jam 19.00 wita sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau pohon jati itu dalam kawasan hutan lindung yang dilarang untuk ditebang, karena sepengetahuan terdakwa pohon kayu jati tersebut yang menanam adalah orangtuanya karena tumbuh di atas kebun milik orang tuanya dan terdakwalah yang merawat pohon jati tersebut bersama almarhum suaminya ;
- Bahwa aparat desa setempat tidak pernah melarang terdakwa ketika terdakwa akan menjual pohon kayu jati tersebut dan menurut keterangan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI ada uang yang diberikan kepada aparat desa setempat yang berasal dari uang jual beli pohon kayu jati tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti atau surat kepemilikan kebun milik orangtuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pohon kayu jati yang tumbuh didalam kebun milik orang tuanya ;

- Bahwa sebelum dilakukan penebangan pohon kayu jati yang menunjukkan pohon kayu jati yang akan ditebang kepada penebang adalah anaknya yang bernama SUNARJO ;
- Bahwa terdakwa menjual pohon jati tersebut kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL berupa pohon sedangkan yang mengololah serta memotong serta berbentuk bantalan adalah saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- Bahwa uang pembelian kayu jati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) tersebut diberikan terlebih dahulu oleh saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI diberikan dulu kepadanya sebelum ditebang ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitar desa ;

Berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) f undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, oleh karenanya majelis hakim akan secara langsung membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) pasal 50 ayat (3) f undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan ;
3. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Untuk menjelaskan apakah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur pasal 50 ayat (3) f undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada diri terdakwa sebagai berikut ;

1. Unsur “Barangsiapa “

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* ” menurut pendapat majelis hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “ *barang siapa*” menurut majelis hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengembang hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *eror in persona* dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sedangkan untuk menuntukan apakah seseorang terdakwa yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum a quo seta haruslah dibuktikan pula mengenai *kasalahan* pada diri terdakwa (relevansi dengan adanya ataukah tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah JUMRAH binti DA'DA, oleh karenanya identitas terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka untuk membuktikan apakah terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah benar terdakwa JUMRAH binti DA'DA, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang oleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa penuntut Umum di persidangan yaitu saksi MAHJUD bin KARIM, saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL, dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu JUMRAH binti DA'DA, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, telah diperkuat oleh keterangan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI dan saksi KAMALUDDI bin BANTO, dimana materi keterangan kedua saksi tersebut dibacakan di persidangan, serta pula terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga majelis hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

2. **Unsur "Dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau hasil hutan"**

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua a quo secara hukum haruslah dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca secara cermat materi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan oleh majelis hakim relevansi dengan pembuktian unsur ke dua a quo adalah adanya jual beli kayu jati antara terdakwa dengan saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL melalui perantaraan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI, maka dari itu

majelis hakim berpendapat elemen unsur yang relevan untuk dipertimbangkan adalah ***“Dengan sengaja menjual hasil hutan”***. ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud ***“Dengan sengaja”*** dalam teori hukum pidana adalah menghendaki (***Willens***) dan mengetahui (***Wettens***) artinya seorang pelaku perbuatan pidana dianggap melakukan suatu perbuatan pidana secara sengaja apabila pelaku tersebut secara sadar mengetahui menghendaki akan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut (***Kesengajaan sebagai kepastian***) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan pada diri terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana *in casu* ***“Menjual hasil hutan”*** berdasar alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan dalam perkara *a quo* adalah kayu jati yang berjumlah 104 pohon yang berada dalam kawasan hutan lindung Gunung Silanu yang telah diolah menjadi 307 batang oleh terdakwa. Bahwa untuk memperjelas mengenai keberadaan kayu jati yang ditebang dari kawasan hutan lindung Gunung Silanu tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa kayu jati olahan yang berjumlah 307 batang. Bahwa keberadaan kayu jati olahan tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Oleh karenanya keberadaan hasil hutan *in casu* kayu jati yang berjumlah 307 batang, menurut pendapat majelis hakim telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JUMRAH binti DA'DA menyatakan pada intinya yang bersangkutan telah menjual kayu jati yang diakui sebagai miliknya sebanyak 104 pohon yang berada dalam kawasa hutan lindung desa Gunung Silanu, kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL melalui perantara saksi TAMBARA Dg. MILE bin BASRI pada hari senin tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 17.00 wita. Bahwa ketarangan terdakwa JUMRAH binti DA'DA

berkaitan dengan jual beli kayu jati dalam kawasan hutan lindung tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL serta bersesuaian pula dengan materi keterangan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI dan saksi KAMALIDDI bin BANTO. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL di persidangan bersesuaian dengan materi keterangan saksi TAMBARA Dg. MLE bin BASRI dapat diketahui bahwa saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL membeli kayu jati yang diakui sebagai milik dari terdakwa JUMRAH binti DA'DA yang berada dikawasan hutan lindung Gunung Silanu tersebut, karena saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL terlebih dahulu ditawarkan oleh saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI ketika saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL bertemu dengan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI di rumah Dg RANI dimana pada saat itu saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI menawarkan kayu jati dengan harga keseluruhan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL dan akhirnya disepakati seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menurut keterangan saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL pula bahwa pada saat transaksi jual beli saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI tidak memberitahukan bahwa kayu jati yang dijual tersebut berada dalam kawasan hutan lindung Gunung Silanu melainkan saksi TAMBARA DG. MILE memberitahukan kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL jika pohon kayu jati yang dijual tersebut adalah milik sah dari terdakwa JUMRAH binti DA'DA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JUMRAH binti DA'DA yang bersesuaian dengan keterangan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI menerangkan uang pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa JUMRAH binti DA'DA. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI sebagian uang hasil penjualan kayu jati tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetorkan ke kas desa melalui saksi

KAMALUDDIN bin BANTO. Keterangan para saksi berkaitan dengan adanya uang pembayaran dari saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL kepada terdakwa JUMRAH binti DA'DA maupun adanya uang dari hasil uang jual beli kayu jati yang disetorkan ke kas desa tersebut dibenarkan pula oleh saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan motif terdakwa menjual pohon kayu jati yang berada didalam kawasan hutan lindung Gunung Silanu tersebut karena terdakwa merasa pohon kayu jati tersebut ditanam oleh orang tuanya sejak lama dan terdakwa bersama suaminya pulalah ia merawat tanaman jati tersebut, selanjutnya mengenai status kepemilikan terdakwa terhadap pohon kayu jati yang berada dalam kawasan hutan lindung Gunung Silanu tersebut dibenarkan pula oleh saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa yang dipersidangan pada intinya menerangkan bahwa pohon kayu jati yang dijual oleh terdakwa kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL adalah sah milik terdakwa karena yang menanam dulunya adalah orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan, majelis hakim berpendapat terdakwa telah sengaja menjual hasil hutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa kesengajaan terdakwa menjual hasil hutan tersebut didasari karena terdakwa ***mengetahui perbuatannya*** menjual hasil hutan yaitu dengan menerima uang pembelian dari saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL serta menyuruh anak terdakwa yang bernama SUNARJO untuk memberikan tanda silang pada pohon kayu jati yang akan dijual kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL ;
- b. Bahwa adanya ***kehendak*** pada diri terdakwa saat melakukan penjualan kayu jati milik terdakwa dapat diketahui dari motif terdakwa yang menjual pohon kayu jati tersebut dengan alasan karena terdakwa ingin mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya ;

- c. Bahwa karean terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam melakukan penjualan kayu jati diakui sebagai miliknya maka majelis hakim berpendapat terdapat kesengajaan pada diri terdakwa dalam menjual kayu jati yang diakui sebagai milik terdakwa JUMRAH binti DA'DA yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur “Dengan sengaja menjual hasil hutan” telah terpenuhi maka keseluruhan kedua *a quo* yaitu “Dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan” secara hukum haruslah dianggap terpenuhi pula ;

3. **Unsur ”Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ketiga *a quo* mensyaratkan bahwa hasil hutan yang dibeli sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua haruslah dapat diketahui atau setidaknya patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan “secara tidak sah” berdasarkan konsep hukum pidana menurut majelis hakim adala apabila sesuatu *in casu* hasil hutan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah mejelis hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua telah dibuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menjual hasil hutan *in casu* 104 batang pohon kayu jati kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL melalui perantaraan saksi TAMBARA DG. MILE bin BASRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan dipertimbangkan apakah hasil hutan *in casu* 104 batang pohon kayu jati yang dijual terdakwa kepada saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hasil hutan yang berasal dari

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan motif melakukan penjualan kayu jati yang diakui sebagai milik terdakwa melalui perantaraan saksi TAMBARA DG. MILE binti BASRI adalah karena terdakwa merasa pohon kayu jati tersebut adalah milik sah terdakwa karena yang menanam adalah orang tuanya. Keterangan terdakwa tersebut dibenarkan pula oleh saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai status pohon kayu jati yang dijual oleh terdakwa, saksi ahli Ir. HAMZAH D bin MUH. JUFRI menyatakan bahwa pohon kayu jati tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dimana pada kawasan hutan lindung tersebut telah diberi tanda atau patok sekelilingnya, oleh karenanya adalah tidak benar jika pohon kayu jati yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut dimiliki oleh orang perseorangan *in casu* terdakwa JUMRAH binti DA'DA melainkan milik negara. Bahwa keterangan ahli yang menyatakan pohon kayu jati yang dijual oleh terdakwa berasal dari hutan lindung tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi MAHJUD bin KARIM dalam kapasitas saksi sebagai anggota polsek Bangkala yang menemukan tumpukan kayu jati dilokasi yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan / *pledooi* terdakwa yang menyatakan melakukan penjualan pohon kayu jati merasa yakin bahwa pohon kayu jati tersebut sah milik terdakwa JUMRAH binti DA'DA padahal pohon kayu jati tersebut berada dalam kawasan hutan lindung, menurut pendapat majelis hakim pembelaan / *pledooi* terdakwa tersebut haruslah kesampingkan karena seharusnya terdakwa tidak mengetahui atau patut menduga bahwa tanaman pohon kayu jati tersebut berada dalam kawasan hutan lindung karena disekitar hutan lindung telah diberi batas berupa patok yang ditanam sekeliling kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan maka majelis hakim berkesimpulan hasil hutan *in casu* 104 pohon kayu jati yang berasal dari kawasan hutan lindung yang diakui sebagai milik sah dari terdakwa padahal terdakwa seharusnya mengetahui atau dapat menduga bahwa pohon kayu jati tersebut berada dalam kawasan hutan lindung tetapi terdakwa menjualnya ke saksi ANDI BUDIMAN bin ZAENAL, sehingga kayu jati yang bersal dari kawasan hutan lindung yang dijual oleh terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan maka majelis hakim berpendapat unsur “*Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*” telah terpenuhi ;

Oleh karena keseluruhan unsur pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi oleh karena itu majelis hakim berkeyakinan pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan kepada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Mempertimbangkan suatu perbuatan pidana sebelum menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu ***yang pertama*** berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari ***perbuatan pidana (delik)*** yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang

didakwakan dalam dakwaan *primair* Jaksa Penuntut Umum dan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari *kesalahan*, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan / *gen straaft zonder schuld*”, yang artinya tidak pidana tanpa kesalahan maka majelis hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidaknya *kesalahan* pada diri terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa *in casu* ada atau tidaknya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa ;

Menilai apakah terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri terdakwa, menurut hemat majelis hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri terdakwa (baik alasan pembeda maupun pemaaf) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan dan setelah majelis hakim mengamati selama persidangan ternyata terdakwa adalah seorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hakim terdakwa dianggap cakap dan maupun bertanggungjawab atas segala perbuatannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Karena unsur kesalahan dapat dibuktikan didalam diri terdakwa dan secara nyata terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana “MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG

DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Amar Putusan

Ketentuan pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRAH binti DA'DA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, yaitu : “MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMRAH binti DA'DA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : *11 (sebelas) bulan*, dan pidana denda sebesar Rp. *10.000.000 (sepuluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : *1 (satu) bulan.* ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 307 (tiga ratus tujuh) batang kayu jati berbentuk bantalan, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari : RABU tanggal : 24 JUNI 2009 oleh kami **M. FAKTUR ROCHMAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, SH** dan **RATIH WIDAYANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Ketua Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota – Hakimn Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NATSIRSYAM, SH** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh **MUH. ASRI IRWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Pembuktian Dan Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

1. Pembuktian dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam ajaran Islam apabila mengambil suatu keputusan harus berdasarkan oleh pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, begitupun halnya dengan pembuktian dalam pandangan hukum Islam. Alat bukti yang sangat berpengaruh pada proses pembuktian dalam hukum Islam yaitu petunjuk dan keterangan saksi untuk mengungkap suatu perkara, contohnya pada perkara zina atau perkara cerai dengan alasan zina.

Subtansi penyelesaian perkara cerai dengan alasan zina dalam ketentuan ini adalah terletak pada pada proses pembuktian. Pembuktian tersebut dimaksudkan apakah pemohon atau penggugat mampu membuktikan bahwa termohon atau tergugat benar-benar telah berzina sebagaimana yang dituduhkan. Pembuktian bahwa zina benar-benar terjadi bukan sesuatu yang mudah atau gampang. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4.⁹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya :

⁹ Hadi Dg Mapuna, *Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: CV. Kencana, 2003) h 50

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.¹⁰

[1029] Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa seseorang yang menuduh perempuan telah berzina harus mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan tuduhan tersebut. Namun apabila ia tidak mampu mendatangkan saksi, maka ia harus didera sebanyak delapan puluh kali. Saksi yang didatangkan pun harus menyaksikan secara langsung proses persinahan itu. Para saksi harus menemukan dan memergoki sepasang laki-laki dan perempuan itu sedang berhubungan kelamin atau *catching a couple in flagrante delicto*. Para saksi tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau konklusi.¹¹

Selain itu juga, maksud dari ayat di atas ialah mengingatkan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. Berdasar dari kalimat “mereka tidak mendatangkan empat orang saksi” mengandung makna yang berarti pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan.¹² Untuk itu dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran hukum maka diwajibkan agar dapat mendatangkan empat orang saksi guna untuk memberikan keterangan mengenai kesaksiannya dan dipertimbangkan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1989) h 543

¹¹ Hadi Dg Mapuna, *Op.Cit*, h. 51

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Volume 9) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 288

dari keterangan keempat saksi tersebut agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

Dalam pandangan Islam istilah penebangan liar secara spesifik mungkin tidak akan kita dapat, akan tetapi dalam pandangan Islam hanya menjelaskan secara garis besar tentang lingkungan serta larangan merusak lingkungan dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pengrusakan lingkungan oleh manusia. Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf (07) ayat 56 dan surah Ar-Ruum (30) ayat 41 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya :

¹³Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 221

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁴

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat ke ayat dalam Al-Qur'an, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agamanya, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan mengatakan : “*telah nampak kerusakan di darat*” seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan “*di laut*” seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, “*disebabkan karena perbuatan tangan manusia*” yang durhaka, “*sehingga akibatnya Allah menciptakan*” yakni merasakan sedikit “*kepada mereka sebagian dari*” akibat “*perbuatan*” dosa dan pelanggaran “*mereka, agar mereka kembali*” ke jalan yang benar.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas dengan judul penulisan skripsi ini, penulis menafsirkan bahwa penebangan liar (*Illegal Logging*) merupakan suatu perbuatan yang merusak alam, seperti yang diuraikan sebelumnya berdasarkan terjemahan surah Ar-Ruum (30) ayat 41 tentang kerusakan yang terjadi di darat yang disebabkan karena tangan manusia yang mengakibatkan kekeringan, paceklik, dan hilangnya rasa aman. Akibat dari penebangan liar hutan (*Illegal Logging*) maka kekeringan dan paceklik akan melanda alam. Hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk. Para penebang liar hidup di tempat yang mewah, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dekat

¹⁴Departemen Agama RI, Loc.Cit.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Volume 11) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 76

hutan dan tidak melakukan *Illegal Logging* hidup miskin dan menjadi korban atas perbuatan jahat para penebang liar. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial yang sangat menyakitkan masyarakat.¹⁶

Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang *fasad*, antara lain:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
لُفْسَادَ ۚ¹⁷

Terjemahannya :

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai *al-fasad* (QS. Al-Baqarah (2): 205).

Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengancam, sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat

¹⁶*Ibid*, h. 77

¹⁷*Ibid*

tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak saja., sebagaimana makna kata *zhahara* yang telah disinggung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.¹⁸

Dari penjelasan kedua penjelasan ayat tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam Islam juga melarang manusia merusak lingkungan karena dapat menimbulkan bencana terutama apabila manusia merusak hutan, karena telah kita pahami bahwa keberadaan lingkungan dalam hal ini hutan, tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja untuk kehidupan manusia akan tetapi hutan juga sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan sebagai paru-paru dunia, senjata ampuh bagi “*Global Warming*” serta banyak manfaat lain. Maka dari itu dijanjikan bahwa manusia yang berbuat baik kepada lingkungan itu dekat dengan Allah SWT.



¹⁸*Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap Penebangan Liar (*Illegal logging*), diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVI pasal 183 dan 184.
2. Pada pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO) di Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan pasal 184 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;
 - (1) Saksi 4 orang
 - (2) Keterangan Ahli 1 orang
 - (3) Petunjuk / barang bukti yaitu 307 (tiga ratus tujuh) batang kayu jenis jati berbentuk bantalan.
 - (4) Keterangan Terdakwa

B. Implikasi Penelitian

Menurut hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pembuktian perkara Penebangan Liar oleh Penuntut Umum maka penulis mengimplikasikan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana pada umumnya di persidangan harus berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk itu mengenai tindak pidana penebangan liar (*Illegal*

Logging) ketentuannya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai tentang penegakan hukum tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di pengadilan harus tetap berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti dengan tindak pidana pada umumnya.

2. Dalam pembuktian tindak pidana di pengadilan harus berdasarkan pasal 184 KUHAP untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah di pengadilan dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuktian tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, Semarang : PT Rajagrafindo persada, 2004
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi, di Indonesia*, Jakarta : Raih Asia Sukses, 2011.
- Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Arafat, Yasir, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*, t.t, Permata Press, t.t
- Atmasasmita, H. Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004
- Chazawi, H. Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Dg Mapuna, Hadi, *Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama*, CV. Kencana 2003.
- Hamzah, A, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka cipta, 2008
- <http://Status.Lingkungan.Hidup.Indonesia.Tahun.2002>. Di akses pada 23-Oktober-2011
- <http://www.Asas-asas-pembuktian-dalam-hukum-pidana.com>, Di akses pada (02 Oktober, 2011, pukul 16:34:09)
- <http://www.Kehutanan.com>, Diakses)04 Oktober2011, pukul 15:39:49)
- <http://www.Undang-undang.Kehutanan.com>, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999,Tentang Kehutanan* Diakses)01 Januari2012, pukul 20:40)
- Kurnianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Surabaya : Usaha Nasional, 1987
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)* Semarang : Aneka Ilmu, 1977.
- Rasyid, H. Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2009.

- R. Pardoen, Sutrisno, Drs, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Pnduan Mahasiswa)*, Jakarta : PT Gramedia Utama, 1989
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah,(Volume 11)* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah,(Volume 9)* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Wicaksono, Andre, *Kamus Lengkap 900 Milliard Inggris Indonesia* Jakarta : Pustaka Ilmu , t. Thn
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta : PT. Rineka cipta, 2000.

